

Mei 2019

Nomor : /TU.020/G.1/05/2019
Hal : Laporan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

**Yth. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Humas
Jakarta**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 30/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal , berikut kami laporkan kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian .

**LAPORAN EVALUASI
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**

A. Pendahuluan

1. Umum

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka kita harus dapat meningkatkan pelayanan dalam bentuk informasi dan dokumentasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas mengenai apa yang menjadi kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian baik yang sudah ataupun yang sedang kita laksanakan. Saat ini kegiatan yang telah kita lakukan meliputi kegiatan bahan hukum dan literatur hukum serta peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk informasi publik yang harus diberikan dan disebarluaskan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui media elektronik

(website) atau lainnya sehingga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mutlak adanya.

Kementerian Pertanian berkewajiban mempublikasikan informasi kepada publik untuk mendapat kepercayaan, komitmen dan partisipasi yang luas dalam keikutsertaanya untuk melaksanakan program-program pembangunan pertanian. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan integritas yang memiliki keterampilan dan keahlian serta sikap perilaku yang baik dalam menjalankan fungsi kehumasan secara proporsional dan professional.

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan kegiatan ini dimaksudkan sebagai bahan acuan untuk melaporkan kinerja penyiapan bahan pengelolaan informasi publik lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada bulan Mei 2019.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan Evaluasi Pengelolaan informasi publik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada bulan Mei 2019 sesuai dengan target realisasi kegiatan.

4. Dasar

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal, Subagian Hukum dan Humas antara lain mempunyai tugas dan fungsi : **Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik.**

C. Hasil yang dicapai

Dapat disampaikan tugas dan fungsi Subbagian Hukum dan Humas terkait kegiatan **Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik** pada bulan Mei 2019 antara lain :

1) Pengelolaan Pengaduan melalui : LAPOR!

Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Melalui LAPOR! Periode Mei 2019								
No	Materi Pengaduan	Tanggal Disposisi KSP	Batas	Penanggung Jawab	Tanggal Surat	Tanggal	Status	Keterangan
			Waktu TL			Jawab		
1.	Dugaan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan Miskordinasi	19-Feb-19		Ditjen Horti	02-Mei-19	-	Dalam Proses	
2.	Keluhan Harga Gabah	25-Mar-19		Admin	-	03-Mei-19	selesai	
3.	Aspirasi Kartu Tani	29-Mar-19		Admin		03-Mei-19	selesai	
4.	Harga Gabah anjlok	02-Apr-19		Admin		03-Mei-19	selesai	
5.	Pemintaan informasi program Kementerian Pertanian	18-Mei-19		Admin		22-Mei-19	selesai	
6.	Bantuan Pertanian	15-Feb-19		Admin		22-Mei-19	selesai	
7.	Pemintaan Informasi Dupak Online	10-Mei-19		Admin		22-Mei-19	selesai	
8.	Pengaduan Keluhan harga gabah	10-Mei-19		Admin		22-Mei-19	selesai	
9.	Pemohonan bantuan mesin permanen	22-Apr-19		Admin		22-Mei-19	selesai	
10.	Pemohonan penanganan harga kopra	22-Apr-19		Admin		22-Mei-19	selesai	
11.	Keluhan kenaikan harga gabah	09-Apr-19		Admin		22-Mei-19	selesai	
12.	Pembantaian unggas	04-Apr-19		Ditjen PKH		22-Mei-19	Dalam Proses	
13.	Pemohonan diskusi dari himpunan petani Indonesia	04-Feb-19		Admin		22-Mei-19	selesai	
14.	Harga pupuk	12-Apr-19		Admin		22-Mei-19	selesai	
15.	Izin Pemasukan Unggas dari Malaysia"	13-Mei-19		Ditjen PKH			Dalam Proses	
16.	Keluhan Bantuan Pertanian	24-Apr-19		Ditjen PSP			Dalam Proses	
17.	Pengaduan Belum Menerima BPMT	15-Apr-19		Admin		23-Mei-19		
18.								

- 2) Pengelolaan Pengaduan melalui SMS Center, pada bulan Mei 2019 tidak terdapat pengaduan melalui aplikasi ini.
- 3) Telah mengikuti rapat koordinasi penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 09.00 s.d selesai bertempat di ruang seminar gedung PIA. Hasil rapat tersebut adalah timeline penyusunan DIP Kementan :
 - PPID Pembantu Pelaksana tanggal 27 Juni 2019, diserahkan ke PPID Eselon I.
 - PPID Pelaksana Eselon I tanggal 8 Juli 2019, diserahkan ke PPID Utama.
 - Penentuan DIP Kementan tanggal 22 Juli 2019.
 - Raker PPID akan dilakukan sekitar bulan Agustus atau September 2019.
 - Kewajiban badan publik dalam PPID, membuat DIP, membuat SOP layanan, mengembangkan sistem informasi dan menyediakan meja layanan informasi.
 - Rakor PPID minimal dilakukan 6 bulan sekali.

D. Kesimpulan

Secara umum kegiatan Subbagian Hukum dan Humas terkait kegiatan melakukan **Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik** pada bulan Mei 2019 telah berjalan.

E. Penutup

Demikian laporan kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan mohon arahan selanjutnya.

**Kepala Subbagian Hukum dan
Humas**

Eko Supriyanto, S.Sos